

## **Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Melalui Belanja Langsung Terhadap Produk Domestik Regional Bruto**

Afrianti Elsy Vanomy  
Universitas Universal Batam  
Korespondensi: [yanti.elva803@gmail.com](mailto:yanti.elva803@gmail.com)

### **Abstrak**

PAD merupakan indikator mengukur tingkat kesuksesan pembangunan di Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Otonomi daerah berefek positif untuk daerah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam yang kaya. Begitu pula sebaliknya. Contohnya PAD di Wilayah Kabupaten Malang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan Deskriptif Kuantitatif dengan menyelidiki potensi Pendapatan Daerah, Biaya Langsung yang berefek kepada PDRB di Wilayah Kabupaten Malang. Data rentang waktu 10 tahun (2003 – 2012) serta menggunakan Analisa Jalur. Hasil analisa hubungan untuk komponen Pendapatan yang terdiri dari Dana Perimbangan maupun Retribusi Daerah terhadap Belanja Langsung sebesar 53,45%. Bagi Hasil menduduki posisi teratas. Pendapatan terhadap PDRB sebesar 56,22%, Belanja Langsung terhadap PDRB 23,62%. Jadi komponen Pendapatan berpengaruh kuat terhadap PDRB khususnya Dana Perimbangan, namun syaratnya harus melalui Belanja Langsung dalam pengimplementasian pembangunannya.

**Kata Kunci :** PAD, Dana Perimbangan, Belanja Langsung, PDRB, Kabupaten Malang.

### **Abstract**

*PAD is an indicator to measure the level of success of development in the District / City in the implementation of Regional Autonomy. Regional autonomy has a positive effect on regions that have rich natural resource potential. Vice versa. For example, PAD in Malang Regency has increased from year to year since the implementation of regional autonomy. This research uses descriptive quantitative by investigating the potential of Regional Revenue, Direct Costs that have an effect on GRDP in Malang Regency. Data span of 10 years (2003 - 2012) and using Path Analysis. The results analysis of the relationship for the Revenue component consisting of the Revenue Sharing Fund and Regional Levies on Direct Expenditures were 53.45%. Revenue Sharing Fund occupies number one. Income to GRDP of 56.22%, Direct Expense of GRDP of 23.62%. So the Revenue component strongly influences the GRDP, especially it must go through Direct Expenditure in implementing its development.*

**Keywords:** PAD, Revenue Sharing Funds, Direct Expenditures, GRDP, Malang Regency.

## **A. LATAR BELAKANG**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan alat tolak ukur yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi Daerah berdampak positif untuk daerah yang kaya potensial sumber daya alam, dan berefek negatif untuk daerah yang miskin potensi sumber daya alam, sehingga dana yang dihasilkan dari PAD terbatas dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan pelaksanaan Otonomi daerah itu sendiri. Prinsip dasar pemberian wewenang otonomi atas dasar pertimbangan bahwa daerahlah yang mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Sehingga diharap akan lebih memacu pertumbuhan

JAD: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Dewantara

Vol 2 No 1, Januari-Juli 2019

<https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/42>

Hal 62-73

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut (Sumitro:1995) Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat, kualitas, serta kesejahteraan segenap lapisan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari indikator makro yaitu PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Jadi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah pengukuran berdasarkan adanya aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Data ini menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumberdaya pembangunan yang dimilikinya, sehingga besarnya setiap daerah bervariasi sesuai potensi dan faktor produksinya (Sukirno, 1978). Menurut (Todaro, 2005:105) semakin banyak angkatan kerja berarti semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik namun semua tergantung pada sistem perekonomian untuk menyerap dan mempekerjakan tambahan pekerja secara produktif.

Menurut Kuncoro (2005: 334-358) pelaksanaan otonomi daerah membuat khawatir dikarenakan banyak Kota / Kabupaten yang tidak mampu membiayai kebutuhannya daerahnya sendiri, karena lebih dari separuh jumlah Kota maupun Kabupaten yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, sehingga membiayai kebutuhannya hanya 15% dari total anggarannya. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Dana Perimbangan dari Pusat perbedaannya sangat jauh. Pengeluaran Pemerintah merupakan instrument utama dalam kebijakan peningkatan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga Pemerintah Daerah dan DPRD harus menyusun APBD untuk menyentuh sektor ekonomi produktif, yang riil sesuai potensi, kebutuhan dan potensi sumber finansial. (Uppal: 2005).

Pemerintah wajib mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar masyarakat bisa menikmati dari hasil pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) wilayah Kabupaten Malang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini sejalan dengan otonomi daerah sudah mulai berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah dan juga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan keuntungan produk-produk yang dihasilkan dari perusahaan milik daerah. Pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Malang telah menunjukkan kemajuan signifikan karena diimbangi dengan belanja modal daerah dalam meningkatkan infrastruktur dan prasarana yang sebelumnya masih kurang.

Kontribusi besar yang diberikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor-sektor unggulan seperti sektor restoran, rumah makan, hotel. Mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sehingga

dalam penelitian ini akan meneliti tentang hubungan Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang sah dan belanja langsung terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Malang Periode 2003-2012.

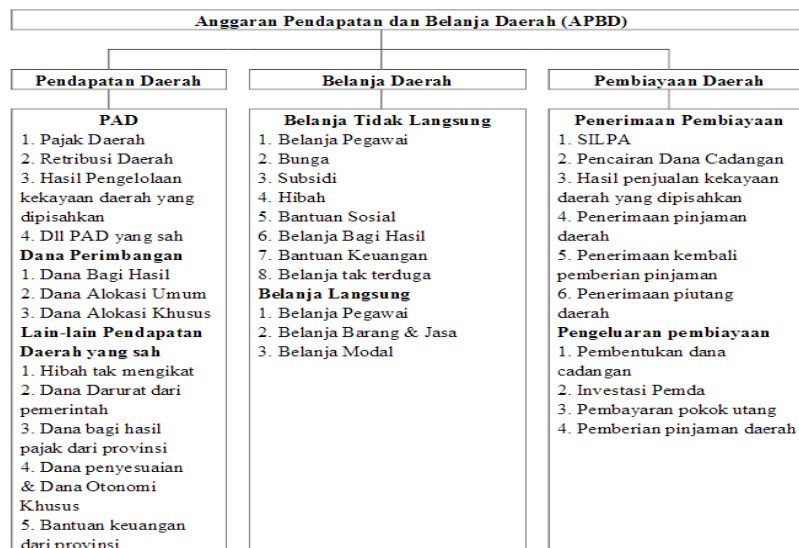
## B. TINJAUAN PUSTAKA

### Landasan Teori/ Pengkajian Teoritis Kebijakan Otonomi Daerah

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal I dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mardiasmo (2002:59) menyatakan bahwa tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan public dan memajukan perekonomian daerah.

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 disajikan dalam gambar di bawah ini :



Gambar 1. Bagan Komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### Kemampuan Keuangan Daerah

Menurut Permendagri pada pasal 1 ayat 6 Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah di Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya semua bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

### Konsep Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 17 Tahun 2003 Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Lain yang menambah ekuitas dana lancar

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kecilnya kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan sebagaimana yang tertuang dalam APBD merupakan bukti kekurangmampuan Daerah dalam mengelola sumber daya perekonomian terutama sumber-sumber pendapatannya. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil Perusahaan Milik Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.

### **Konsep Pajak Daerah**

Ciri-ciri yang melekat dari pengertian pajak daerah : Pertama; Pembayaran yang dilakukan kepada Pemerintah Daerah (Penguasa Publik), Kedua; Pungutannya dapat dipaksakan, Ketiga; Pungutannya mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Keempat; Pungutannya tersebut tidak mengharapkan balas jasa (kontra prestasi) dari Pemerintah. Dari sudut pandang, pembebanannya, ada Pajak Langsung (Direct Tax) yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan dipungut secara periodik. Pajak tidak langsung (Indirect Tax) yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain dan pemungutannya tidak secara periodik. Ditinjau dari segi perundang-undangan, pajak dibedakan atas : Pertama; Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh Negara berdasarkan Undang-Undang melalui inspeksi keuangan. Kedua; Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang berdasarkan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Daerah setempat.

### **Konsep Retribusi Daerah**

Ciri yang melekat pada pengertian retribusi yaitu : Pertama; Retribusi dipungut oleh Negara dalam hal ini bahwa semua Pendapatan Daerah dari publik, Kedua; Dalam pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis, dan Ketiga; Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan Negara.

### **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

Untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan rumah tangga daerah yang relatif cukup besar, maka kepada daerah juga diberika sumber-sumber pendapatan berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan UU No.32 tahun 2004. Perusahaan Daerah dibedakan menjadi dua kategori : (1) Perusahaan Asli Daerah yaitu Perusahaan Daerah yang didirikan oleh daerah itu sendiri. (2) Perusahaan Daerah yang berasal dari Pemerintah atasannya.

### **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi : Pertama; hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Kedua; jasa giro, Ketiga; Pendapatan bunga, Keempat; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan Kelima; komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / jasa oleh daerah.

## **Prinsip dan Kriteria Perpajakan dan Retribusi Daerah**

Kebijakan pemungutan pajak daerah berdasarkan Perda, diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai) karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang ada pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Sehingga objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat. Kriteria pertimbangan yang diperlukan untuk pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu : Pertama; Pajak untuk tujuan stabilisasi ekonomi, Kedua; Basis pajak yang diserahkan kepada Daerah seharusnya tidak terlalu “mobile”. Ketiga; Pajak Daerah seharusnya “visible”. Keempat; Pajak Daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Kelima; Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat Pemerintahan, namun penyerahan kewenangan pemungutannya kepada Daerah akan tepat sepanjang manfaatnya dapat dilokalisir bagi pembayar pajak lokal.

### **Dana Perimbangan**

Hubungan keuangan pusat dan daerah adalah menyangkut pembagian tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan tertentu antara tingkat-tingkat Pemerintahan. Untuk mencapai perimbangan agar potensi dan sumber daya di masing-masing daerah bisa dibagi dengan sesuai. Menurut Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 dana perimbangan terdiri dari :

1. Dana Bagi Hasil terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), PPH pasal 21,25, 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari APBN. DAU dihitung dengan Celah Fiskal + Alokasi Dasar. Pemindahbukuan berasal dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah. Penyaluran setiap bulan 1/12 dari DAU.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) bersumber dari APBN dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
4. Lain-Lain PAD yang sah terdiri dari : Hibah berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri. Dana darurat dari Pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan bencana alam, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya.

### **Pengeluaran Pemerintah dan Belanja Daerah**

Belanja daerah dikelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan Pengeluaran Pemerintah dibagi menjadi : Pengeluaran Rutin, Pengeluaran Pembangunan, Pembayaran transfer Pemerintah.

**Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap PAD**

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan Pemerintah. Dalam konsep makro, semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin bear pula potensi penerimaan daerah. Jadi dengan adanya peningkatan PDRB maka hal ini mengindikasikan akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Saragih, 2003).

**Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengeluran Pemerintah dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)**

**a. Hubungan antara PAD dan PDRB**

Hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan fungsional karena pajak daerah merupakan fungsi dari PDRB, yaitu dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan Pemerintah dari pajak daerah.

**b. Hubungan PAD dengan Pengeluaran Pemerintah**

Optimalisasi penerimaan PAD harus didukung dengan upaya peningkatan kualitas layanan publik. Berbagai belanja yang dialokasikan Pemerintah hendaknya yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan retribusi.



**Gambar 2 : Kerangka Konseptual**

**Hipotesis**

Berdasarkan kerangka konseptual di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- Ha1: Terdapat hubungan antara Pajak Daerah dengan Belanja Langsung  
 Ha2 : Terdapat hubungan antara Retribusi Daerah dengan Belanja Langsung  
 Ha3 : Terdapat hubungan antara Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Langsung.  
 Ha4 : Terdapat hubungan antara Dana Perimbangan dengan Belanja Langsung  
 Ha5 : Terdapat Hubungan Belanja Langsung dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

### C. METODOLOGI PENELITIAN

#### Rancangan Penelitian

Rancangan Penelitian ini adalah deskriptif. Dalam hal ini mengidentifikasi dan mengkaji serta menganalisis potensi-potensi Pendapatan Daerah dari sisi PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Langsung yang nantinya akan berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Malang. Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Alasannya daerahnya lebih luas dibandingkan wilayah Kota Malang maupun Kota Batu, namun PAD dirasa masih kurang mencolok. Data didapat dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Malang. Sebagai pusat penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Daerah wilayah Kabupaten Malang.

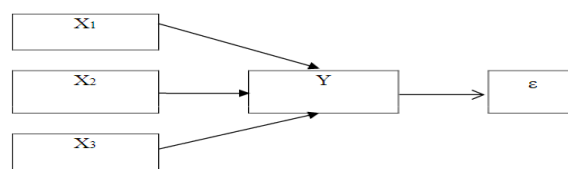
#### Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling kuota, data populasi PAD, Dana Perimbangan, Belanja Langsung dan PDRB di Kab. Malang diambil dalam kurun waktu 10 tahun sejak 2003-2012.

#### Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisa korelasi, analisis jalur (Path Analysis) hubungan antara variable-variable yang diminati.

#### Diagram Jalur



**Gambar 3 : Diagram Jalur**

Diagram diatas menunjukkan hubungan antara X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y, adalah hubungan Kausal. Sedangkan X1 dengan X2, X1 dengan X3, X2 dengan X3 masing-masing hubungan korelasional. Jadi X1 adalah Pajak Daerah, X2 adalah Retribusi Daerah, X3 adalah Lain-lain PAD yang sah, sedangkan Y adalah Belanja Langsung,  $\epsilon$  adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

## ANALISA DAN PEMBAHASAN

### Analisa dan Pembahasan

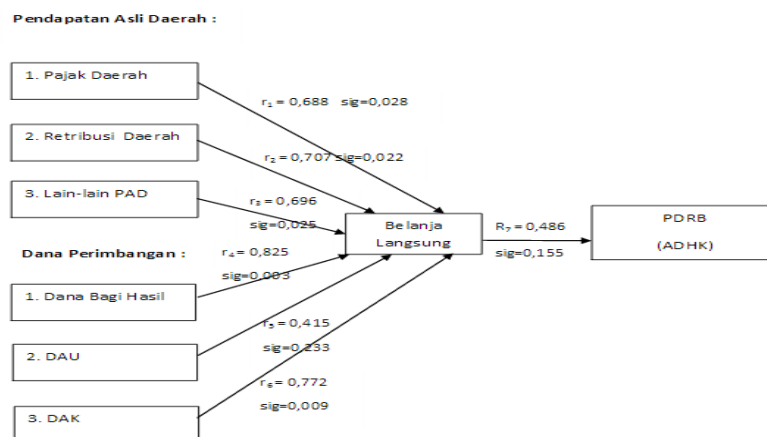
Berdasarkan hasil uji korelasi yang telah dilakukan dari data PAD, Dana Perimbangan, Lain lain PAD yang sah, Belanja Langsung terhadap PDRB dari tahun 2003-2012 maka hasil sebagai berikut :

**Tabel 1. Hubungan antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Langsung dan**

Keterangan	Belanja Langsung		PDRB ADHK	
	r	sig	r	sig
Pajak Daerah	0,688	0,028	-	-
Retribusi Daerah	0,707	0,022	-	-
Lain-lain PAD	0,696	0,025	-	-
Dana Bagi Hasil	0,825	0,003	-	-
DAU	0,415	0,233	-	-
DAK	0,772	0,009	-	-
Belanja Langsung	-	-	0,486	0,155

**Sumber : Data Diolah,2014**

Di table 1 di atas bahwa hasil uji menggunakan SPSS untuk hubungan antara Pendapatan Daerah dengan belanja langsung dan Pendapatan Daerah terhadap PDRB ADHK, menggunakan korelasi (nilai r) dan menguji signifikansinya dengan menggunakan analisis lajur dengan nilai propabiliti sig sebesar 0,05% sehingga apabila dituangkan dalam diagram sebagai berikut ini:



Gambar 4 : Hasil Analisa Pendapatan Daerah, Belanja Langsung dan PDRB.

Gambar di atas ini merupakan hasil analisa setiap komponen variabel pembentuk dari Pendapatan Daerah yang terdiri dar PAD, dan Dana Perimbangan. Satu per satu dianalisa kekuatan hubungannya dengan korelasi terhadap Belanja Langsung, dan Belanja Langsung terhadap PDRB ADHK seberapa kuatkah.



**Tabel 2. Hubungan antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Langsung dan PDRB**

Keterangan	Belanja Langsung		PDRB ADHK	
	r	Tingkat Hubungan	R	Tingkat hubungan
Pajak Daerah	0,688	Kuat	-	-
Retribusi Daerah	0,707	Kuat	-	-
Lain-lain PAD	0,696	Kuat	-	-
Dana Bagi Hasil	0,825	Sangat Kuat	-	-
DAU	0,415	Cukup Kuat	-	-
DAK	0,772	Kuat	-	-
Belanja Langsung	-	-	0,486	Cukup Kuat

*Sumber : Data Diolah, 2014*

Tabel di atas merupakan hasil pengolahannya setiap variabel pembentuk Pendapatan Daerah terhadap Belanja Langsung dan Belanja Langsung terhadap PDRB ADHK.

**Tabel 3. Kriteria Koefisien Korelasi Nilai r**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80 - 1,000	Sangat Kuat
0,60 - 0,799	Kuat
0,40 - 0,599	Cukup Kuat
0,20 - 0,399	Rendah
0,00 - 0,199	Sangat Rendah

*Sumber Ridwan (2005 :136)*

Jadi Table di atas ini merupakan acuan rentang interval koefisien dari korelasi nilai R. Yang digunakan untuk menyatakan kuat lemahnya suatu hubungan antar variabel yang sedang diteliti. Tabel ini digunakan untuk membantu melengkapi keterangan di Tabel 2.

**Tabel 4. Kontribusi antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Langsung dan PDRB**

Keterangan	Belanja Langsung			PDRB ADHK		
	r	r <sup>2</sup>	Kontribusi (%)	r	r <sup>2</sup>	Kontribusi (%)
Pajak Daerah	0,688	0,4733	47,33	-	-	-
Retribusi Daerah	0,707	0,4998	49,98	-	-	-
Lain -lain PAD	0,696	0,4844	48,44	-	-	-
Dana Bagi Hasil	0,825	0,6806	68,06	-	-	-
DAU	0,415	0,1722	17,22	-	-	-
DAK	0,772	0,596	59,6	-	-	-
Belanja Langsung	-	-	-	0,486	0,2362	23,62

*Sumber : Data Diolah, 2014*

Menurut Ridwan (2012 : 62), untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing dapat ditentukan dengan rumus Koefisien Determinasi (KP) sebagai berikut :

$$KP = r^2 \times 100\%$$

Keterangan : KP = Koefisien Determinasi

R = Koefisien Korelasi

Sehingga hasil dari perhitungan tersebut, dituangkan dalam Tabel 10 di atas. Untuk menyatakan besaran koefisien determinasi setiap variable pembentuk Pendapatan Daerah terhadap Belanja Langsung dan Belanja Langsung terhadap PDRB ADHK.

**Uji Hipotesis**

Uji signifikansi analisis jalur dilakukan dengan membandingkan antara nilai probabilitas 0,05 dengan nilai probabilitas sig yang terdapat di table korelasi.

**a. Hubungan antara Pajak Daerah dengan Belanja Langsung**

Hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

**Ha1 : Terdapat hubungan antara Pajak Daerah dengan Belanja Langsung.**

Hasil Sig sebesar 0,028 jadi  $0,028 < 0,05$  maka  $H_a$  diterima artinya terdapat hubungan antara pajak daerah dengan belanja langsung. Pada tabel korelasi didapatkan hasil besarnya hubungan 0,688 artinya hubungan kuat antara pajak daerah dengan belanja langsung. Kontribusi sebesar 47,33% 52,67% variabel lain mempengaruhi Belanja Langsung. Pajak daerah meningkat maka belanja langsung meningkat khususnya untuk Belanja Modal. Semakin tinggi pendapatan suatu daerah maka semakin maju pembangunannya.

**b. Hubungan Retribusi dengan Belanja Langsung**

**Ha2 : terdapat hubungan antara retribusi Daerah dengan Belanja Langsung**

Hasil sig sebesar  $0,022 < 0,05$  maka  $H_a$  diterima artinya ada hubungan antara Retribusi Daerah dengan Belanja Langsung. Korelasi sebesar 0,707 menunjukkan hubungan kuat antara Retribusi Daerah dengan Belanja Langsung sebesar 49,98% sisanya 50,02% ditentukan variable lainnya. Sehingga makin tinggi retribusi daerah maka belanja langsung sesuai pos APBD makin tinggi juga. Retribusi lebih tinggi dibanding dengan pajak daerah dikarenakan retribusi berkaitan langsung dengan imbalan jasa yang harus dibayarkan oleh Masyarakat kepada Pemerintah, akibat ada suatu pelayanan jasa atau izin tertentu. Manfaat yang dirasakan masyarakat adalah secara langsung.

**c. Hubungan Lain-lain PAD yang sah dengan Belanja Langsung**

**Ha3 : Terdapat hubungan antara Lain-lain PAD dengan Belanja Langsung.**

Hasil : sig sebesar 0,025. Maka  $0,025 < 0,05$  maka  $H_a$  diterima. Artinya terdapat hubungan antara Lain-Lain PAD yang sah dengan Belanja Langsung. Tabel korelasi hasilnya 0,696. Sehingga kontribusi Lain-lain PAD yang sah dengan Belanja Langsung sebesar 48,44% sisanya 51,56% ditentukan variabel yang lain. Jadi Pendapatan didalam Lain-Lain PAD yang sah berasal dari PDAM, PD Jasa-Yasa bila pendapatan besar akan dialihkan sebagian ke kas daerah untuk Belanja Modal (Belanja Langsung).

**d. Hubungan antara Dana Perimbangan dengan Belanja Langsung.**

**Ha4 : Terdapat hubungan antara Dana Perimbangan dengan Belanja Langsung.**

Hasil : sig sebesar 0,003 maka  $0,003 < 0,05$  maka  $H_0$  diterima. Artinya : Terdapat hubungan antara Dana Perimbangan dengan Belanja Langsung. Hasil tabel korelasi sebesar 0,825 artinya hubungan sangat kuat sebesar 68,06% sisanya 31,94% ditentukan variable yang lain. Dana Perimbangan untuk Belanja Langsung digunakan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa atau Belanja Rutin.

**e. Hubungan antara Belanja Langsung dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

**$H_0$  : Terdapat hubungan antara Belanja Langsung dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).**

Hasil : Sig sebesar 0,155 jadi  $0,155 > 0,05$  maka  $H_0$  ditolak artinya tidak ada hubungan antara Belanja Langsung dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tabel korelasi 0,486 artinya ada hubungan yang kuat antara Belanja Langsung dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kontribusi sebesar 23,62% sisanya 76,38% ditentukan oleh variable yang lain.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pendapatan berpengaruh terhadap Belanja Langsung sebesar 53,45%, Belanja Langsung berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto sebesar 23,62%, sedangkan Pendapatan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 56,22%. Pendapatan berpengaruh terhadap Belanja Langsung khususnya Belanja Modal untuk fasilitas daerahnya. Namun Belanja Lagsung secara tidak langsung mendorong Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dana Bagi Hasil paling kuat pengaruhnya terhadap belanja langsung dikarenakan jumlah yang besar, dana tersebut dari Pusat untuk Daerah melakukan pembangunan sehingga mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ADHK) di Kab. Malang. Supaya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pemerintah Kab. Malang harus lebih menggali dan mengkaji ulang Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh daerahnya tersebut sehingga Pemerintah bisa melakukan pungutan Pajak dan Retribusi Daerah secara intensif dan aktif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiatmojo Dwi Gatot. “ *Pembangunan Berkelanjutan dengan Optimasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Membangun Perekonomian dengan Basis Pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin,*” Jakarta, 2003
- Adi dalam wong, 2006.” *Pembangunan Infrastruktur*”. Bandung
- Atep Adya Barata. “ *Pendapatan Asli Daerah.*” Terjemahkan Barata, jakarta 2004.
- Andriani Evi, Handayanti Indah Sri. “ *Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap PAD Kab. Merangin.*” Jambi, Jurnal Ilmiah Universitas Balanghari, 2008.

- Azis, 1997.” *Pendapatan Asli Daerah*”. Jakarta: Erlangga
- Badan Pusat Statistik. “ *Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang 2003-2012*. “  
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
- Bappenas. 2003. “ *PAD terhadap PDRB*”. Jakarta: Erlangga
- Brata. 2004. “ *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*”. Jakarta
- Elita, 2007. “ *Penerimaan Pendapatan Asli Daerah*” Rajawali
- Mardiasmo, 2004.” *Optimalisasi Belanja Modal*”. Jakarta: Erlangga
- Saberan. H.2002:5. “ *Produk Domestik Regional Bruto*” . Jakarta : Rajawali
- Pratiwi, 2007.” *Proposi Pendapatan Asli Daerah*.” Rajawali
- Provinsi Sul-Sel, BPS. 2003. “ *Pengertian PDRB*” Sulsel:Erlangga
- Tambunan, 2006. “ *Pertumbuhan Ekonomi*.” Jakarta
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, “ *Undang-Undang Otonomi Daerah*”, Jakarta, Fokusmedia, 2004
- Widjaja, 2002:11.” *Pendapatan Asli Daerah*.” Jakarta: UI
- Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang tahun 2004-2009* dari Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang Edisi Tahun 2010
- Harianto dan Adi, 2007. “ *PAD Mempengaruhi Pemda dalam Pengalokasian Belanja Modal Tahun Berikutnya*.” Jakarta.